

# Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022

Yulli Fatimah<sup>1</sup>, Wikan Budi Utami<sup>2</sup>, M Hasan Ma'ruf<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia.

## Alamat Email:

fatimah.yulli2107@gmail.com<sup>1</sup>, budiutamiwikan@gmail.com<sup>2</sup>, hasan.stie.aas@gmail.com<sup>3</sup>

## Sitasi Artikel:

Fatimah, Y., Utami, W. B., & Ma'ruf, M. H., (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(2), 531-539.

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of Regional Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and population on regional expenditures in the Regencies/Cities of East Java Province during the 2019-2022 period. This research employs a quantitative method using secondary data obtained from official publications of the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The sample includes 38 Regencies/Cities in East Java Province, with a total of 152 observations. Data analysis was conducted using multiple linear regression, and the results indicate that PAD and population have a positive and significant impact on regional expenditures, while DAU does not show a significant effect. These findings suggest that increases in PAD and population growth can drive higher regional expenditures, whereas the allocation of DAU requires further evaluation to ensure its effectiveness. This study provides important insights for policymakers in managing regional finances, particularly in enhancing fiscal autonomy and more effective resource allocation.*

**Keywords:** *Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Population, and Regional Expenditures.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Sampel penelitian mencakup 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan total 152 observasi. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda, dan hasilnya menunjukkan bahwa PAD dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sementara DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dan pertumbuhan jumlah penduduk dapat mendorong peningkatan belanja daerah, sedangkan alokasi DAU memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Rasio Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Dan Belanja Daerah.*

## 1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

diatur dalam berbagai undang-undang yang bertujuan memberikan wewenang lebih besar



kepada pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengelola sumber daya keuangan mereka, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pengelolaan keuangan daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat dan masalah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masalah spesifik yang dihadapi oleh daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, misalnya, adalah bagaimana memaksimalkan belanja daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Belanja daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah yang efektif menjadi kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang optimal.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana PAD, DAU, dan jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah di Jawa Timur. PAD yang mencerminkan kemandirian finansial daerah dianggap sebagai sumber utama yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun, bagaimana PAD benar-benar berkontribusi terhadap belanja daerah masih menjadi pertanyaan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Selain itu, DAU, sebagai komponen penting dari pendapatan daerah yang bersumber dari APBN, memiliki peran signifikan dalam mendukung stabilitas fiskal daerah. Namun, apakah peningkatan DAU selalu berhubungan positif dengan peningkatan belanja daerah, atau apakah ada faktor lain yang lebih dominan? Hal ini

menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah senantiasa meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan PAD, agar mampu mendanai kebutuhan daerah. Semakin tinggi kontribusi dana Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dapat membuktikan semakin sedikit ketergantungan pemerintah daerah kepada perintah pusat (Safa'ah, 2021). Ketika PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat maka alokasi Belanja Daerah juga akan ikut meningkat. Hal ini dinyatakan oleh Safa'ah (2021) dalam penelitiannya yang menekankan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat berpengaruh pada Belanja Daerah, dimana semakin besar Dana Alokasi Umum ke pemerintah daerah artinya semakin besar belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Liando, 2017). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Liando, 2017) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu, terdapat *research gap* dari penelitian Suryana (2017) yang menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Jumlah penduduk dapat berpengaruh pada Belanja Daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk semakin meningkat maka akan menyebabkan Belanja Daerah semakin meningkat juga (Liando, 2017). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Liando, 2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya memberikan gambaran yang beragam mengenai hubungan antara variabel-variabel ini dan belanja daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap



belanja daerah, sementara studi lain menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau bahkan kontradiktif. Hal ini menimbulkan research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini, khususnya dalam konteks Jawa Timur, yang memiliki karakteristik demografis dan ekonomi yang unik dibandingkan provinsi lain.

Sehingga penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah, pemerintah daerah di Jawa Timur dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengelola keuangan daerah mereka, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019-2022. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan teori desentralisasi fiskal serta memberikan panduan praktis bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

## 2. Tinjauan Teoritis

### 2.1 Belanja Daerah

Belanja daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah (Siregar, (2015)). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori utama: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing kategori ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Secara teoritis, belanja daerah merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks desentralisasi fiskal, belanja daerah

diharapkan mencerminkan kebutuhan dan prioritas daerah, serta menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri.

### 2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk hasil pengelolaan BUMD, dan lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, komisi dan potongan, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap terhadap mata uang asing.

### 2.3 Dana Alokasi Umum

Menurut Nordiawan (2017) "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi." Faktor yang mempengaruhi DAU yaitu jumlah PNS di daerah tersebut, jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kematian konstruksi daerah, produk regional bruto per kapita daerah, PAD yang dihasilkan setiap tahun, dan DBH dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

### 2.4 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis RI (Republik Indonesia) selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2016). Bidarti (2020) mendefinisikan pertumbuhan penduduk sebagai pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Sumber data kependudukan terdiri dari sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Desain Penelitian



Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian asosiatif ini berfokus pada pengujian hipotesis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2022.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah penduduk, dan belanja daerah di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 daerah, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Mengingat ukuran populasi yang relatif kecil, penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Total data yang diperoleh dari 38 Kabupaten/Kota selama empat tahun (2019-2022) menghasilkan 152 observasi.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, dengan mengambil data yang sudah dipublikasikan di situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Selain itu, dilakukan juga studi pustaka untuk melengkapi informasi dan referensi terkait variabel yang diteliti.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang melibatkan beberapa tahap analisis sebagai berikut:

#### a. Statistik Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk setiap variabel.

#### b. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi syarat-syarat statistik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi:

- 1) **Uji Normalitas:** Menggunakan grafik histogram dan normal probability plot untuk memastikan bahwa data terdistribusi secara normal Ghozali (2018).
- 2) **Uji Multikolinieritas:** Dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi tinggi antara variabel independen. Uji ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance, di mana  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0.1$  menunjukkan tidak adanya multikolinieritas Ghozali (2018).
- 3) **Uji Heteroskedastisitas:** Dilakukan dengan menggunakan scatterplot antara residual standar (SRESID) dan prediksi standar (ZPRED) untuk memastikan bahwa varians residual adalah konstan Ghozali (2018).
- 4) **Uji Autokorelasi:** Menggunakan uji Run's Test untuk memastikan tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Autokorelasi diindikasikan dengan nilai  $Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05$  Ghozali (2018).

#### c. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik ini digunakan untuk menganalisis pengaruh simultan dan parsial variabel independen (PAD, DAU, dan jumlah penduduk) terhadap variabel dependen (belanja daerah). Persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

- Y = Belanja Daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X1 = PAD
- X2 = DAU
- X3 = Jumlah Penduduk
- e = Error

#### d. Uji Hipotesis

- 1) **Uji F:** Dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan



berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dan melihat tingkat signifikansi (p-value). Jika Fhitung > Ftabel dan p-value < 0.05, maka hipotesis alternatif diterima Ghozali (2018).

- 2) **Uji t:** Dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian adalah membandingkan nilai thitung dengan ttabel, di mana thitung > ttabel dan p-value < 0.05 menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Ghozali (2018).
- 3) **Koefisien Determinasi (Adjusted R Square):** Digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square mendekati 1, semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas data Ghozali (2018).

3.6. Alat Analisis

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 23.0. Hasil pengolahan data akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dan menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PAD	152	131,84	5.381,92	545,9594	787,76830
DAU	152	367,58	1.783,37	917,8135	297,98919
Jumlah Penduduk	152	129.014	2.896.195	1.052.770,33	654.558,146
Belanja Daerah	152	804,41	9,162,66	2.508,8174	1.392,38633
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Output SPSS 23

Tabel statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum dari variabel yang diteliti, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah penduduk, dan belanja daerah di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2022.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Memiliki nilai

minimum sebesar Rp 13.184 juta dan nilai maksimum sebesar Rp 5.381.920 juta. Nilai rata-rata (mean) PAD adalah Rp 5.459.594 juta dengan standar deviasi sebesar Rp 787.768,30 juta. Ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antara daerah-daerah dalam hal kemandirian fiskal.

**Dana Alokasi Umum (DAU):** Nilai minimum DAU adalah Rp 36.758 juta dan nilai maksimum adalah Rp 1.783.370 juta. Rata-rata DAU adalah Rp 9.178.135 juta dengan standar deviasi sebesar Rp 2.979.891,90 juta, yang menunjukkan variasi dalam alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah.

**Jumlah Penduduk:** Jumlah penduduk minimum adalah 129.014 jiwa dan maksimum 2.896.195 jiwa, dengan rata-rata 1.052.770 jiwa dan standar deviasi 654.558 jiwa. Ini mencerminkan perbedaan besar dalam skala populasi di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

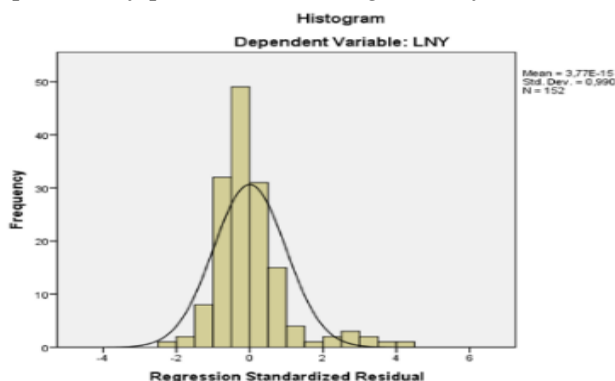
**Belanja Daerah:** Belanja daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 80.441 juta dan nilai maksimum sebesar Rp 9.162.660 juta. Rata-rata belanja daerah adalah Rp 2.508.817,40 juta dengan standar deviasi sebesar Rp 1.392.386,33 juta. Variasi ini menunjukkan perbedaan kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan publik.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis lanjut.

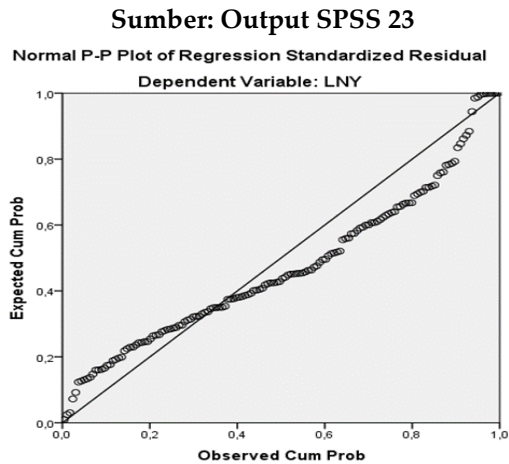
1) Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas melalui grafik histogram dan normal probability plot menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, dengan data yang menyebar mengikuti garis diagonal pada normal probability plot. Berikut hasil gambarnya.



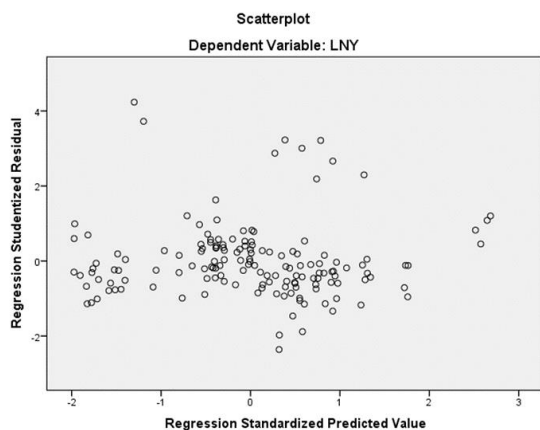
Gambar 2. Histogram





**Gambar 3. Normal Probability Plot**  
Sumber: Output SPSS 23

2) Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4. Scatterplot**  
Sumber: Output SPSS 23

Dari hasil scatterplot antara residual standar dan prediksi standar, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak tanpa pola yang jelas, menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

3) Uji Multikolinieritas

**Tabel 2. Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LNX1	0,553	1,807
LNX2	0,139	7,213
LNX3	0,114	8,738

Sumber : Output SPSS 23

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1.

Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dalam model.

4) Uji Autokorelasi

**Tabel 3. Uji Autokorelasi**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-0,02583
Cases < Test Value	76
Cases >= Test Value	76
Total Cases	152
Number of Runs	73
Z	-0,651
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,515

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil uji Run's Test, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,515 (lebih besar dari 0,05), menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam data.

4.3. Analisis Regresi

Hasil analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. Persamaan regresi linier yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized	Standardized	Beta
		Coefficients	Coefficients	
1	(Constant)	0,690	0,234	
	LNX1	0,294	0,023	0,430
	LNX2	0,102	0,092	0,077
	LNX3	0,336	0,047	0,543

Sumber: Output SPSS 23

$$Y=0,690+0,294X1+0,102X2+0,336X3 \dots\dots\dots (2)$$

Interpretasi dari persamaan regresi adalah sebagai berikut:

- 1) **PAD (X1):** Memiliki koefisien sebesar 0,294, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan PAD akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,294 satuan. Hasil ini signifikan dengan p-value < 0,05, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
- 2) **DAU (X2):** Memiliki koefisien sebesar 0,102, namun hasil ini tidak signifikan dengan p-value > 0,05, yang menunjukkan bahwa DAU tidak



memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dalam konteks penelitian ini.

- 3) **Jumlah Penduduk (X3):** Memiliki koefisien sebesar 0,336, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan jumlah penduduk akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,336 satuan. Hasil ini signifikan dengan p-value < 0,05, menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

#### 4.4. Pengujian Hipotesis

- 1) Uji F

**Tabel 5. Uji F**

Model	Sum of Squares	Mean Square	Df	F	Sig.
1 Regression	32,378	10,793	3	460,331	0,000 <sup>b</sup>

Sumber: Output SPSS 23

Dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah data 152 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,66. Berdasarkan hasil uji F memiliki Fhitung sebesar (460,331) > Ftabel (2,66) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka pengujian model regresi dengan uji F layak digunakan dalam penelitian ini.

- 2) Uji t

**Tabel 6. Uji t**

Model	T	Sig.
(Constant)	2,946	0,004
LNX1	12,495	0,000
LNX2	1,116	0,266
LNX3	7,176	0,000

Sumber: Output SPSS 23

Dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah data 152 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,65494 atau 1,655.

Nilai t hitung PAD sebesar 12,495 > t tabel sebesar 1,655. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat diartikan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Nilai t hitung Dana Alokasi Umum sebesar 1,116 < t tabel sebesar 1,655. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,266 > 0,05, maka dapat diartikan bahwa hipotesis nol (H0) diterima dan

hipotesis alternatif (H2) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Belanja Daerah.

Nilai t hitung Jumlah Penduduk sebesar 7,176 > t tabel sebesar 1,655. Dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa hipotesis nol (H0) Ditolak dan hipotesis alternatif (H3) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

- 3) Koefisien Determinasi

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,950 <sup>a</sup>	0,903	0,901	0,15312

Sumber: Output SPSS 23

Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,901. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk dapat menjelaskan variabel Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur sebesar 90,1%, sedangkan sisanya sebesar 9,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### 4.5. Pembahasan

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liando (2017), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan PAD akan menyebabkan tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar terhadap Belanja Daerah.

- b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum



berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Apabila DAU meningkat, justru akan membuat Belanja Daerah menurun. Hal ini dapat terjadi karena alokasi DAU di tiap-tiap kota dan kabupaten berbeda-beda dan penggunaannya untuk tujuan tertentu dan tidak digunakan untuk Belanja Daerah melainkan untuk keperluan belanja gaji pegawai, keperluan belanja operasional dan urusan pemerintah lainnya.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Liando (2017) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah mampu menjadikan DAU sebagai sumber penting dalam pengalokasian Belanja Daerah.

c. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin meningkat Jumlah Penduduk, maka semakin meningkat Belanja Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liando (2017), bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2022. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebagai indikator kemandirian fiskal dan pertumbuhan jumlah penduduk, yang mendorong permintaan akan layanan publik, dapat meningkatkan alokasi belanja daerah. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yang mengindikasikan bahwa alokasi DAU mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan belanja daerah, atau penggunaannya lebih diarahkan pada kebutuhan non-produktif. Temuan

ini menekankan pentingnya pengelolaan PAD yang lebih optimal dan perlunya evaluasi atas penggunaan DAU untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mendukung pembangunan daerah secara efektif. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat strategi fiskal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran.

## 6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi, tanpa melakukan verifikasi lapangan atau observasi langsung. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis, terutama dalam memahami konteks spesifik di setiap daerah. Kedua, penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan jumlah penduduk, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan semua faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Ketiga, penelitian ini terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2022, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain atau periode waktu yang berbeda.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, beberapa saran dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti di masa depan disarankan untuk melakukan verifikasi lapangan atau menggabungkan data sekunder dengan data primer melalui wawancara atau survei, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks lokal dan pengelolaan keuangan daerah. Kedua, penelitian berikutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah variabel independen lain, seperti belanja modal,



tingkat inflasi, atau tingkat kemiskinan, yang mungkin juga mempengaruhi belanja daerah, sehingga analisis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, memperluas cakupan geografis penelitian ke provinsi lain atau memperpanjang periode waktu studi akan membantu menguji konsistensi temuan dan meningkatkan generalisasi hasil. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## 7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih semua pihak yang senantiasa membantu dan membimbing serta mengajarkan banyak ilmu sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2016. Statistik Indonesia Tahun 2010. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik.
- Bidarti, Agustina. 2020. Teori Kependudukan. Bogor: LINDAN BESTARI.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Liando, I. I. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1-22.
- Nordiawan, D. (2017). *Anggaran Disuatu Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang *Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang*, (2009).
- Safa'ah, L.N., Rahmawati, E. Novem, A. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 188-299.
- Siregar, B., (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Suryana, R. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.

